

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	26
1. Spesifikasi Penelitian	27
2. Metode Pendekatan	27
3. Tahap Penelitian	27
4. Teknik Pengumpulan Data	29
5. Alat Pengumpul Data	30
6. Analisis Data	31
7. Lokasi Penelitian	32
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG, SERTA LARANGAN BAGI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	33
A. Kedudukan Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	33
B. Tugas Dan Wewenang Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	41
C. Larangan Dan Sanksi Pemberhentian Bagi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	63
BAB III PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH YANG TERLIBAT KASUS KORUPSI DI INDONESIA	68

A.	Sejarah dan Perkembangan Aturan Pemberhentian Sementara Kepala Daerah	68
B.	Gambaran Umum Tentang Kasus Kepala Daerah Yang Terlibat Kasus Korupsi	70
a.	Pemberhentian Sementara Bupati Kabupaten Subang	70
b.	Pemberhentian Sementara Bupati Kabupaten Tanggamus.....	81
C.	Mekanisme Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Di Indonesia.....	83
a.	Pengertian pemberhentian sementara kepala daerah.....	83
b.	Fungsi dan Tujuan Pemberhentian Sementara Kepala Daerah .	88
BAB IV	MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH YANG TERLIBAT KASUS KORUPSI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH....	90
A.	Mekanisme Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Yang Terlibat Kasus Korupsi Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	90
B.	Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah Setelah Menjadi Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	93
C.	Pengaruh Yang Ditimbulkan Akibat Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	96
BAB V	PENUTUP.....	100
A.	Kesimpulan.....	100
B.	Saran.....	101
	DAFTAR PUSTAKA	ix
	LAMPIRAN	xiv